

LAPORAN KEUANGAN AUDITED

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2017

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian - NTB
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017



Jl. Raya Peninjauan Narmada, Nusa Tenggara Barat

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Narmada, 16 April 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. M. Saleh Mokhtar, MP
NIP. 1966 0707 1991 011 001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I Laporan Realisasi Anggaran

II Neraca

III Laporan Operasional

IV Laporan Perubahan Ekuitas

V Catatan atas Laporan Keuangan

A Penjelasan Umum

B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2 Belanja Pegawai

B.3 Belanja Barang

B.4 Belanja Modal

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.4.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

C Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1 Aset Lancar

C.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

C.1.2 Persediaan

C.2 Aset Tetap

C.2.1 Tanah

C.2.2 Peralatan dan Mesin

C.2.3 Gedung dan Bangunan

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

- C.3 Piutang Jangka Panjang
 - C.3.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
 - C.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
 - C.4 Aset Lainnya
 - C.4.1 Aset Tak Berwujud
 - C.4.2 Aset Lain-lain
 - C.4.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
 - C.5 Kewajiban Jangka Pendek
 - C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga
 - C.5.2 Pendapatan Diterima Dimuka
 - C.6 Ekuitas
 - C.6.1 Ekuitas
- D Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
- D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2 Beban Pegawai
 - D.3 Beban Persediaan
 - D.4 Beban Barang dan Jasa
 - D.5 Beban Pemeliharaan
 - D.6 Beban Perjalanan Dinas
 - D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
 - D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
 - D.10 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- E.1 Ekuitas Awal
 - E.2 Surplus/Defisit-LO
 - E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

- E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
 - E.4.1 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
- E.5 Transaksi Antar Entitas
 - E.5.1 Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung
- E.6 Ekuitas Akhir
- F Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2 Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Narmada, 16 April 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. M. Saleh Mokhtar, MP
NIP. 1966 0707 1991 011 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp620,785,214.00 atau mencapai 124.91% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp496,976,000.00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp19,980,112,063.00 atau mencapai 73.14% dari alokasi anggaran sebesar Rp27,316,064,000.00

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp14,721,265,584.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp4,981,699,540.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp9,626,857,708.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp112,708,336.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp9,000,211.00 dan Rp14,712,265,373.00.

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp620,785,214.00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp18,059,009,363.00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-17,438,224,149.00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp534,521,129.00 dan Defisit Rp0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-16,903,703,020.00.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp12,256,233,472.00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-16,903,703,020.00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-165,792,497.00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp19,525,527,418.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp14,712,265,373.00.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN AUDITED

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017			31 Desember 2016
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	496,976,000.00	620,785,214.00	124.91	716,937,177.00
Jumlah Pendapatan		496,976,000.00	620,785,214.00	124.91	716,937,177.00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	7,594,069,000.00	7,537,544,534.00	99.26	7,690,626,405.00
Belanja Barang	B.3	13,566,530,000.00	10,213,146,375.00	75.28	14,015,626,568.00
Belanja Modal	B.4	6,155,465,000.00	2,229,421,154.00	36.22	672,243,700.00
Jumlah Belanja		27,316,064,000.00	19,980,112,063.00	73.14	22,378,496,673.00

II. NERACA AUDITED

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NERACA**

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
Aset Lancar			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1	157,249,319.00	0.00
Belanja dibayar dimuka (prepaid)	C.1.2	75,000,000.00	0.00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	C.1.3	358,971,621.00	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntuta Ganti Rugi	C.1.4	(358,971,621.00)	0.00
Persediaan	C.1.5	4,749,450,221.00	3,349,413,137.00
Jumlah Aset Lancar		4,981,699,540.00	3,349,413,137.00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	424,780,000.00	424,780,000.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	10,280,360,971.00	8,385,398,499.00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	7,092,167,603.00	7,001,267,603.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	523,793,766.00	523,793,766.00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	79,211,500.00	88,956,500.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	270,404,200.00	158,421,200.00
Akumulasi Penyusutan	C.2.7	-9,043,860,332.00	-7,784,707,653.00
Jumlah Aset Tetap		9,626,857,708.00	8,797,909,915.00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1	159,725,000.00	193,435,000.00
Aset Lain-lain	C.4.2	856,539,731.00	644,279,049.00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.4.3	-903,556,395.00	-728,803,629.00
Jumlah Aset Lainnya		112,708,336.00	108,910,420.00
Jumlah Aset		14,802,653,668.00	12,256,233,472.00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	9,000,211.00	0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		9,000,211.00	0.00
Jumlah Kewajiban		9,000,211.00	0.00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.1	14,712,265,373.00	12,256,233,472.00
Jumlah Ekuitas		14,712,265,373.00	12,256,233,472.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		14,721,265,584.00	12,256,233,472.00

III. LAPORAN OPERASIONAL AUDITED

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN OPERASIONAL**

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	620,785,214.00	716,011,922.00
JUMLAH PENDAPATAN		620,785,214.00	716,011,922.00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	7,537,544,534.00	7,689,940,005.00
Beban Persediaan	D.3	2,319,149,427.00	2,891,713,460.00
Beban Barang dan Jasa	D.4	3,408,711,770.00	3,408,185,852.00
Beban Pemeliharaan	D.5	860,036,756.00	707,626,444.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2,221,309,057.00	3,895,337,975.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	113,452,000.00	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	1,239,834,198.00	1,223,053,077.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	358,971,621.00	0.00
JUMLAH BEBAN		18,059,009,363.00	19,815,856,813.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-17,438,224,149.00	-19,099,844,891.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	582,735,102.00	925,255.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	48,213,129.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		534,521,129.00	925,255.00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-16,903,703,020.00	-19,098,919,636.00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS AUDITED

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
EKUITAS AWAL	E.1	12,256,233,472.00	9,898,288,488.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	-16,903,703,020.00	-19,098,919,636.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0.00	0.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.1	-165,792,497.00	-178,202,082.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	19,525,527,418.00	21,635,066,702.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		2,456,031,901.00	2,357,944,984.00
EKUITAS AKHIR		14,712,265,373.00	12,256,233,472.00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat

BPTP-NTB didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas dan fungsi pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi di Era Otonomi Daerah. Sejalan dengan visi Badan Litbang Pertanian, BPTP-NTB bertujuan untuk menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian berkelas dunia yang menghasilkan dan mengembangkan inovasi teknologi pertanian untuk mewujudkan pertanian industrial unggul berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal. Melalui peranan BPTP-NTB diharapkan mampu melakukan percepatan alih teknologi pertanian, mendukung pembangunan pertanian spesifik lokasi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya penelitian pertanian di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Untuk mewujudkan tujuan diatas BPTP-NTB berkomitmen dengan visi “menjadi lembaga pengkajian pertanian terdepan di Nusa Tenggara Barat untuk mewujudkan pertanian industrial berkelanjutan berbasis sumberdaya local dan berdaya saing”.

Untuk mewujudkan visi tersebut Balai Pengkajian Teknologi Pertanian – NTB melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- *Merancang, menghasilkan, dan mengembangkan inovasi pertanian spesifik lokasi, serta rekomendasi opsi-opsi kebijakan pembangunan pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dinamika kebutuhan masyarakat pertanian.*
- *Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan percepatan diseminasi inovasi pertanian kepada para pengguna serta meningkatkan penjangkauan umpan balik inovasi pertanian.*
- *Mengembangkan jaringan kerjasama lokal, nasional dan internasional dalam rangka penguasaan IPTEK, pengembangan pusat data agribisnis pertanian di daerah dan peningkatan peran BPTP NTB dalam pengembangan usaha dan sistem agribisnis, ketahanan pangan serta kesejahteraan petani.*
- *Mengembangkan kapasitas dan akuntabilitas BPTP NTB untuk menghasilkan inovasi pertanian bermutu, memberikan pelayanan-pelayanan prima kepada pengguna.*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - ✓ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - ✓ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - ✓ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	413,090,000.00	413,090,000.00
Pendapatan Jasa	83,886,000.00	83,886,000.00
Jumlah Pendapatan	496,976,000.00	496,976,000.00
Belanja		
Belanja Pegawai	7,389,853,000.00	7,594,069,000.00
Belanja Barang	8,346,928,000.00	13,566,530,000.00
Belanja Modal	389,345,000.00	6,155,465,000.00
Jumlah Belanja	16,126,126,000.00	27,316,064,000.00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp620,785,214.00 atau mencapai 124.91% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp496,976,000.00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	413,090,000.00	472,645,500.00	114.42
Pendapatan Jasa	83,886,000.00	141,433,000.00	168.60
Pendapatan luran dan Denda	0.00	6,705,920.00	0.00
Pendapatan Lain-lain	0.00	794.00	0.00
Jumlah	496,976,000.00	620,785,214.00	124.91

Realisasi Pendapatan TA 2017 mengalami penurunan sebesar -13.41% dibandingkan TA 2016. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	.%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	472,645,500.00	531,273,800.00	-11.04
Pendapatan Jasa	141,433,000.00	170,011,000.00	-16.81
Pendapatan Iuran dan Denda	6,705,920.00	14,727,122.00	-54.47
Pendapatan Lain-lain	794.00	925,255.00	-99.91
Jumlah	620,785,214.00	716,937,177.00	-13.41

Realisasi Belanja pada TA 2017 adalah sebesar Rp19,980,112,063.00 atau 73.14% dari anggaran belanja sebesar Rp27,316,064,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2017

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	7,594,069,000.00	7,538,285,216.00	99.27
Belanja Barang	13,566,530,000.00	10,216,914,375.00	75.31
Belanja Modal	6,155,465,000.00	2,229,421,154.00	36.22
Total Belanja Kotor	27,316,064,000.00	19,984,620,745.00	73.16
Pengembalian Belanja		-4,508,682.00	0.00
Total Belanja	27,316,064,000.00	19,980,112,063.00	73.14

Dibandingkan dengan Tahun 2016, Realisasi Belanja TA 2017 mengalami penurunan sebesar -10.72% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

Pada pertengahan bulan Agustus, BPTP NTB menerima dana APNBP sebesar Rp.10,526,070,000.00 yang digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan berikut ini :

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi s/d 31 Des 2017	Sisa
1	Dukungan Perbenihan Benih Sebar Komoditas Bawang Putih (100.000 kg)	4,000,000,000	937,070,660	3,062,929,340
2	Dukungan Perbenihan Benih Sebar Komoditas Mangga (30.000 Batang Bawah)	450,000,000	446,007,401	3,992,599
3	Dukungan Perbenihan Komoditas Kelapa (5.780 Butir)	66,470,000	66,469,685	315
4	Dukungan Perbenihan Komoditas Jambu Mete (10.000 pohon)	115,000,000	114,847,300	152,700
5	Sarana Prasarana Perkebunan	531,500,000	484,754,154	46,745,846
6	Sarana Prasarana benih hortikultura	580,000,000	487,680,000	92,320,000
7	Kandang ayam BPTP NTB	2,970,000,000	737,783,000	2,232,217,000
8	Sarana pendukung produksi benih hortikultura	970,000,000	4,210,000	965,790,000
9	Sarana pendukung produksi benih perkebunan	560,500,000	5,550,000	554,950,000
10	Ayam KUB Inti	196,000,000	195,918,800	81,200
11	Ayam KUB Plasma	86,600,000	86,586,000	14,000
Total		10,526,070,000	3,566,877,000	6,959,193,000

Tabel diatas menunjukkan sisa dana APBPN yang cukup besar, pada kegiatan Dukungan Perbenihan Benih Sebar Komoditas Bawang Putih dan Kandang ayam BPTP NTB, realisasi anggaran terkendala oleh gagal nya lelang dan gagal nya penunjukan langsung. Kecilnya realisasi APBPN ini mempengaruhi realisasi belanja secara keseluruhan, yang berakibat menurunnya nilai belanja tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	.%
Belanja Pegawai	7,537,544,534.00	7,690,626,405.00	-1.99
Belanja Barang	10,213,146,375.00	14,015,626,568.00	-27.13
Belanja Modal	2,229,421,154.00	672,243,700.00	231.64
Total Belanja	19,980,112,063.00	22,378,496,673.00	-10.72

B.2 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp7,537,544,534.00 dan Rp7,690,626,405.00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2017 mengalami penurunan sebesar -1.99% dari TA 2016. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah PNS yang memasuki masa purna bakti (pensiun) dan mutasi ke daerah lain.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7,372,497,216.00	7,551,067,199.00	-2.37
Belanja Lembur	165,788,000.00	148,472,000.00	11.66
Jumlah Belanja Kotor	7,538,285,216.00	7,699,539,199.00	-2.09
Pengembalian Belanja Pegawai	-740,682.00	-8,912,794.00	-91.69
Jumlah Belanja	7,537,544,534.00	7,690,626,405.00	-1.99

B.3 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp10,213,146,375.00 dan Rp14,015,626,568.00. Realisasi belanja barang TA 2017 mengalami penurunan sebesar -27.13% dari TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Kecilnya realisasi APNBP yang diberikan pada BPTP-NTB pada bulan Agustus 2017 mempengaruhi realisasi belanja barang secara keseluruhan.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	528,930,000.00	375,020,000.00	41.04
Belanja Barang Non Operasional	2,423,674,186.00	2,401,510,350.00	0.92
Belanja Barang Persediaan	2,817,150,003.00	2,828,053,160.00	-0.39
Belanja Jasa	522,107,373.00	631,655,502.00	-17.34
Belanja Pemeliharaan	753,506,756.00	676,276,444.00	11.42
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2,221,309,057.00	3,895,807,975.00	-42.98
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	875,237,000.00	3,207,773,137.00	-72.72
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	75,000,000.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	10,216,914,375.00	14,016,096,568.00	-27.11
Pengembalian Belanja Barang	-3,768,000.00	-470,000.00	701.70
Jumlah Belanja	10,213,146,375.00	14,015,626,568.00	-27.13

B.4 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2,229,421,154.00 dan Rp672,243,700.00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 231.64% dibandingkan TA 2016.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,026,538,154.00	513,822,500.00	294.40
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	202,883,000.00	158,421,200.00	28.07
Jumlah Belanja Kotor	2,229,421,154.00	672,243,700.00	231.64
Pengembalian Belanja Modal	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	2,229,421,154.00	672,243,700.00	231.64

B.4.1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2,026,538,154.00 dan Rp513,822,500.00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 294.40% dibandingkan TA 2016.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,026,538,154.00	513,822,500.00	294.40
Jumlah Belanja Kotor	2,026,538,154.00	513,822,500.00	294.40
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	2,026,538,154.00	513,822,500.00	294.40

B.4.2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp202,883,000.00 dan Rp158,421,200.00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 28.07% dibandingkan TA 2016.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	202,883,000.00	158,421,200.00	28.07
Jumlah Belanja Kotor	202,883,000.00	158,421,200.00	28.07
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	202,883,000.00	158,421,200.00	28.07

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp157,249,319.00 dan Rp0.00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Nilai ini merupakan sisa hibah dari ACIAR yaitu pihak donor dari Australia.

C.1.2 BELANJA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp75,000,000.00 dan Rp0.00. Belanja tersebut adalah sewa lahan seluas 4 hektare untuk mendukung kegiatan perbenihan bawang putih untuk periode Desember 2017 sampai dengan Maret 2018.

C.1.3 BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN / TUNTUTAN

GANTI RUGI

Jumlah bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan / tuntutan ganti rugi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp358,971,621.00 dan Rp0.00. Nilai tersebut merupakan :

- a. penyisihan macet piutang jangka panjang atas TGR CV. Ardhi teknik TTP Potano senilai Rp21,645,000;
- b. penyisihan piutang macet atas kelebihan bayar gedung ttp potano oleh CV. Mustika senilai Rp264,075,333
- c. penyisihan macet piutang jangka panjang ke piutang lancar atas denda keterlambatan pembangunan gedung TTP Potano senilai Rp73,251,288

Nilai tersebut sudah di masukkan kedalam Jurnal umum dan sudah juga di reklas dalam jurnal umum tersebut, yang mengakibatkan munculnya nilai penyisihan piutang tidak tertagih – bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan / tuntutan ganti rugi sebesar minus Rp358,971,621.00.

C.1.4 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4,749,450,221.00 dan Rp3,349,413,137.00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Persediaan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Barang Konsumsi	1,486,250.00	0.00
Suku Cadang	0.00	16,788,000.00
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	524,137,000.00	0.00
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	227,542,137.00	300,684,137.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	1,111,595,000.00	794,995,000.00
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	75,000,000.00	0.00
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	2,219,736,000.00	2,219,736,000.00
Bahan Baku	146,083,134.00	3,810,000.00
Persediaan Lainnya	443,870,700.00	13,400,000.00
Jumlah	4,749,450,221.00	3,349,413,137.00

C.2 ASET TETAP

C.2.1 TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp424,780,000.00 dan Rp424,780,000.00.

C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp10,280,360,971.00 dan Rp8,385,398,499.00.

C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp7,092,167,603.00 dan Rp7,001,267,603.00.

C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp523,793,766.00 dan Rp523,793,766.00.

C.2.5 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp79,211,500.00 dan Rp88,956,500.00.

C.2.6 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp270,404,200.00 dan Rp158,421,200.00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.2.7 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp-9,043,860,332.00 dan Rp-7,784,707,653.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	10,280,360,971.00	6,735,575,448.00	3,544,785,523.00
2	Gedung dan Bangunan	7,092,167,603.00	1,956,951,014.00	5,135,216,589.00
3	Jalan dan Jembatan	70,600,000.00	63,540,000.00	7,060,000.00
4	Irigasi	217,956,000.00	153,888,532.00	64,067,468.00
5	Jaringan	235,237,766.00	133,905,338.00	101,332,428.00
6	Aset Tetap Lainnya	79,211,500.00	0	79,211,500.00
	Akumulasi Penyusutan	17,975,533,840.00	9,043,860,332.00	8,931,673,508.00

C.3 ASET LAINNYA

C.3.1 ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp159,725,000.00 dan Rp193,435,000.00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Aset Tak Berwujud Lainnya	39,810,000.00
Software	119,915,000.00
Jumlah	159,725,000.00

C.3.2 ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp856,539,731.00 dan Rp644,279,049.00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.3.3 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp-903,556,395.00 dan Rp-728,803,629.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	159,725,000.00	-173,166,140.00	-13,441,140.00
2.	Aset Lain-lain	856,539,731.00	-730,390,255.00	126,149,476.00
	Akumulasi Penyusutan	1,016,264,731.00	-903,556,395.00	112,708,336.00

C.5 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp9,000,211.00 dan Rp0.00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Tagihan Telephone bulan Januari 2018	202,981.00	0.00
Tagihan Listrik bulan Januari 2018	8,797,230.00	0.00
Jumlah	9,000,211.00	0.00

C.6 EKUITAS

C.6.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp14,712,265,373.00 dan Rp12,256,233,472.00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp620,785,214.00 dan Rp716,011,922.00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Pendapatan Anggaran Lain-lain	794.00	0.00	0.00
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	6,705,920.00	14,727,122.00	-54.47
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga	141,433,000.00	170,011,000.00	-16.81
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	456,551,900.00	515,736,000.00	-11.48
Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan	2,029,500.00	0.00	0.00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	14,064,100.00	15,537,800.00	-9.49
Jumlah	620,785,214.00	716,011,922.00	-13.30

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp7,537,544,534.00 dan Rp7,689,940,005.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	4,962,588,400.00	5,135,174,160.00	-3.36
Beban Pembulatan Gaji PNS	70,694.00	72,171.00	-2.05
Beban Tunj. Anak PNS	110,681,752.00	116,404,032.00	-4.92
Beban Tunj. Beras PNS	279,541,200.00	291,128,400.00	-3.98
Beban Tunj. Fungsional PNS	836,460,000.00	761,440,000.00	9.85
Beban Tunj. PPh PNS	19,860,578.00	81,228,628.00	-75.55
Beban Tunj. Struktural PNS	23,400,000.00	18,360,000.00	27.45
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	343,582,910.00	349,581,160.00	-1.72
Beban Tunjangan Umum PNS	133,240,000.00	151,579,454.00	-12.10
Beban Uang Lembur	165,788,000.00	148,472,000.00	11.66
Beban Uang Makan PNS	662,331,000.00	636,500,000.00	4.06
Jumlah	7,537,544,534.00	7,689,940,005.00	-1.98

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2,319,149,427.00 dan Rp2,891,713,460.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan baku	1,137,900,664.00	50,069,500.00	2,172.64
Beban Persediaan konsumsi	888,937,008.00	2,836,563,960.00	-68.66
Beban persediaan lainnya	292,311,755.00	5,080,000.00	5,654.17
Jumlah	2,319,149,427.00	2,891,713,460.00	-19.80

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp3,408,711,770.00 dan Rp3,408,185,852.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Bahan	767,184,375.00	770,720,250.00	-0.46
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,410,889,811.00	1,313,051,600.00	7.45
Beban Barang Operasional Lainnya	74,250,000.00	0.00	0.00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	124,680,000.00	124,680,000.00	0.00
Beban Honor Output Kegiatan	245,600,000.00	317,738,500.00	-22.70
Beban Jasa Konsultan	70,800,000.00	289,592,000.00	-75.55
Beban Jasa Lainnya	0.00	3,075,000.00	-100.00
Beban Jasa Profesi	85,750,000.00	95,447,000.00	-10.16
Beban Keperluan Perkantoran	330,000,000.00	250,340,000.00	31.82
Beban Langganan Listrik	119,941,186.00	106,617,480.00	12.50
Beban Langganan Telepon	2,745,798.00	3,149,022.00	-12.81
Beban Sewa	176,870,600.00	133,775,000.00	32.22
Jumlah	3,408,711,770.00	3,408,185,852.00	0.02

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp860,036,756.00 dan Rp707,626,444.00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	384,054,680.00	240,478,525.00	59.70
Beban Pemeliharaan Jaringan	13,308,000.00	19,681,500.00	-32.38
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	356,144,076.00	416,116,419.00	-14.41
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	67,807,000.00	5,000,000.00	1,256.14
Beban Persediaan suku cadang	38,723,000.00	26,350,000.00	46.96
Jumlah	860,036,756.00	707,626,444.00	21.54

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2,221,309,057.00 dan Rp3,895,337,975.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	1,521,815,414.00	2,302,084,264.00	-33.89
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	38,936,150.00	123,979,000.00	-68.60
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	150,248,000.00	360,188,500.00	-58.29
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	510,309,493.00	1,109,086,211.00	-53.99
Jumlah	2,221,309,057.00	3,895,337,975.00	-42.98

D.7 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp113,452,000.00 dan Rp0.00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	113,452,000.00	0.00	0.00
Jumlah	113,452,000.00	0.00	0.00

D.8 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1,239,834,198.00 dan Rp1,223,053,077.00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Amortisasi Software	1,528,750.00	20,862,500.00	-92.67
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	265,324,051.00	264,855,679.00	0.18
Beban Penyusutan Irigasi	24,017,468.00	22,657,028.00	6.01
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	7,060,000.00	7,060,000.00	0.00
Beban Penyusutan Jaringan	25,274,167.00	25,199,395.00	0.30

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	3,954,584.00	10,901,914.00	-63.73
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	912,675,178.00	871,516,561.00	5.05
Jumlah	1,239,834,198.00	1,223,053,077.00	1.60

D.9 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp358,971,621.00 dan Rp0.00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	358,971,621.00	0.00	0.00
Jumlah	358,971,621.00	0.00	0.00

D.10 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	582,735,102.00	925,255.00	0.00
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	-48,213,973.00	0.00	0.00
Jumlah	534,521,129.00	925,255.00	57,670.14

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp12,256,233,472.00 dan Rp9,898,288,488.00.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp-16,903,703,020.00 dan Rp-19,098,919,636.00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp-165,792,497.00 dan Rp-178,202,082.00.

E.4.1 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp-165,792,497.00 dan Rp-178,202,082.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap non revaluasi dan koreksi nilai asset lainnya non revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017. Dengan perincian sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2017.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	164,263,747.00
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-1,528,750.00
Jumlah	165,792,497.00

E.5 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp19,525,527,418.00 dan Rp21,635,066,702.00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2017.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	19,819,712,063.00
Diterima dari Entitas Lain	-620,785,214.00
Transfer Masuk	8,951,250.00
Pengesahan Hibah Langsung	317,649,319.00
Jumlah	19,525,527,418.00

E.5.1 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2017 saldo DDEL adalah sebesar Rp-620,785,214.00 sedangkan DKEL sebesar Rp19,819,712,063.00.

E.5.2 TRANSFER MASUK/TRANSFER KELUAR

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp8,951,250.00 yang terdiri dari:

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp8,951,250.00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2017.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin (laptop 1 unit)	BP2TP	10,230,000.00
2.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		-1,278,750.00
Jumlah			8,951,250.00

E.5.3 PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DAN PENGEMBALIAN PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp317,649,319.00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2017 adalah Rp0.00.

Donor hibah Langsung ini adalah ACIAR yaitu Australian Centre for International Agricultural Research untuk kegiatan Profitable feeding strategies for smallholder cattle in Indonesia.

E.6 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp14,712,265,373.00 dan Rp12,256,233,472.00.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

- Sesuai dengan arahan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dan BPK, maka Nilai Produksi dari anggaran pembelian benih yang menggunakan akun 521811 yang berasal dari APBNP harus dimasukkan kedalam nilai persediaan per akhir tahun 2017. Hal ini menyebabkan bertambahnya nilai bahan baku. Karena penyerahan benih tersebut sesuai dengan BAST terlampir dilaksanakan pada awal tahun 2018, maka pengeluarannya nilai produksi benih tersebut akan dilakukan semester-1 tahun 2018. Adapun besaran Nilai Produksi benih tersebut adalah :

No.	Uraian	Nilai
1	Produksi Benih Jambu Mete	50,000,000
2	Produksi Benih Kelapa Dalam	21,675,000
Total		71,675,000

- Sesuai dengan SOP, per tanggal 31 Desember 2017, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan stock opname atas persediaan, namun awal Januari di ketahui bahwa ada salah catat persediaan pada tahun 2015. Setelah dilakukan koreksi maka nilai persediaan pada stock opname berbeda (dengan nilai persediaan pada Neraca SAIBA per 31 Desember 2017).
- Pada tanggal 12 Januari 2018, Inspektorat Jenderal melakukan reuiu terhadap Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat. Catatan hasil reuiu terlampir pada lampiran ini.
- Ada antara jumlah stock opname dengan nilai persediaan pada saiba, hal ini terjadi karena ada koreksi nilai 526 di tahun 2017.
- Di Tahun 2017 ada TP/TGR sebesar Rp. 358,971,620.75 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Pekerjaan	Nilai
1	CV. Archi Teknik	Perencanaan Pembangunan Gedung dan Prasarana/ Sarana TTP Pototano	21,645,000.00
2	CV. Mustika Teratai Mas	Kelebihan Pembayaran Pembangunan Sarana gedung TTP Pototano Sumbawa Barat	264,075,332.75
3	CV. Mustika Teratai Mas	Denda Keterlambatan Pembangunan Sarana gedung TTP Pototano Sumbawa Barat	73,251,288.00
Total			358,971,620.75

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada penjelasan mengenai hal-hal penting lainnya